



BULETIN Parlementaria

NOMOR 941/I/1/2017



DPR RI MINTA TENAGA HONORER PENYULUH PERIKANAN DIANGKAT JADI PNS

GRATIS
Tidak Diperjualbelikan

3

KETUA DPR RI SAMPAIKAN DUKA CITA MUSIBAH
KAPAL ZAHRO EXPRESS

19

KOMISI IV DPR RI APRESIASI SERAPAN
PERUM BULOG LAMPUNG

DPR RI Minta Tenaga Honorer Penyuluh Perikanan Diangkat Jadi PNS

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo meminta kepada pemerintah pusat agar para tenaga honorer Penyuluh Perikanan Bantu di daerah, agar tidak diputus kontraknya, sampai ada pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Kelompok Nelayan di Sumatera Selatan

“ Undang-undang ASN sekarang sudah masuk prolegnas, kedepannya nanti sudah tidak ada lagi honor semuanya sudah PNS. Makanya tolong doanya temen-temen yang sekarang sedang berjuang,” kata Edhy saat melakukan audiensi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan kelompok nelayan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD PPI) Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (16/12).

Edhy memastikan, bahwa DPR RI saat ini sedang memperjuangkan agar para tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS. “Yang kita harapkan

adalah 26 ribu orang, tapi karena keuangan negara terbatas baru mampu 8.698 orang saja. Kami dari DPR RI sejak periode lalu mengawal undang-undang ASN, dan selanjutnya ada penyempurnaan. Untuk tenaga honor ini sudah harus diangkat seluruhnya tanpa alasan apapun harus diangkat, karena hitungannya nggak besar sebenarnya,” tegasnya.

“Tentunya memang tidak bisa kita paksakan besok harus selesai semua, karena kita melihat prioritas anggaran, yang penting progresnya, ada pertumbuhan. Untuk adik-adik tenaga bantu penyuluh, tetap semangat, jangan berkecil hati,” lanjut Edhy.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Sri Dewi Titi Sari meminta agar DPR RI membantu memperjuangkan nasib tenaga honorer penyuluh perikanan.

“Waktu dengar pendapat tahun lalu, Pak Yuddy Chrisnandi (mantan Menteri PAN & RB) itu, ada surat resmi bahwa seluruh penyuluh pertanian perlu diperjuangkan. Masa sih Penyuluh Pertanian diangkat masa kita Perikanan tidak,” kata Sri Dewi dihadapan Komisi IV DPR RI.

Sedangkan, tambah Sri, jumlah penyuluh perikanan keseluruhan itu hanya kurang lebih 4 ribuan. Jumlah

penyuluh perikanan di Sumsel kurang lebih hanya sekitar 85 orang, “Jadi mohon ijin bapak seyogyanya kalau pertanian diangkat masak perikanan tidak, ini anak-anak saya sudah nangis bapak,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Sri pun memaparkan mengenai potensi kelautan dan perikanan Sumsel dimana luas perairan umum daratan mencapai 2,5 juta hektar dengan 23 jenis spesies.

“Oleh sebab itu, ini menjadi barometer kenapa kita terbaik di Asia Tenggara terbaik dalam kaitannya potensi terluas di kawasan Asia Tenggara dan jenis spesiesnya adalah terbanyak di Asia Tenggara,” lanjut Sri Dewi. ■

Ketua DPR RI Sampaikan Duka Cita Musibah Kapal Zahro Express

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa kebakaran yang menimpa Kapal Mesin Zahro Express. Kapal tujuan Jakarta-Pulau Tidung ini terbakar di perairan Pelabuhan Kaliadem Muara Angke, 1 Januari 2017, lalu.



Ketua DPR RI, Setya Novanto

Data terakhir yang diterima Novanto ada 23 penumpang meninggal dunia, belasan lainnya menderita luka-luka dan 17 orang penumpang hilang dalam peristiwa tersebut.

Menanggapi hal tersebut dia mengatakan, "Semoga seluruh korban yang tewas diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman

dan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi musibah ini," ungkap Novanto dalam rilis yang diterima Parlemen, Selasa (03/01).

Dia meminta kepada para pemangku kepentingan agar terlebih dulu fokus menangani korban insiden KM Zahro. Setelah itu dia mengharapkan, agar insiden memilukan ini tidak terjadi lagi. Sebagai Pimpinan DPR RI, Novanto akan memberikan masukan ke Komisi V DPR RI yang memiliki ruang lingkup tugas pengawasan pada masalah ini.

"Saya tentunya akan memberikan masukan ke Komisi V DPR RI, yang saya yakin akan segera membahas masalah ini bersama pemerintah untuk mencari solusi permasalahan dunia transportasi laut kita pada umumnya, khususnya pada insiden kebakaran KM Zahro Express," ujarnya.

Novanto menjelaskan, segala informasi yang beredar harus menanti investigasi objektif. Tidak mengedepankan prasangka dan praduga-praduga yang kontra produktif. Bahwa benar terjadi insiden yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka serta korban hilang yang belum ditemukan hingga saat ini, tapi itu semua tentu memerlukan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut.

"Saya yakin, sebagaimana keyakinan pemerintah DKI dan Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan bahwa KM Zahro memang layak beroperasi," paparnya.

Novanto mendoakan kepada korban luka agar diberi kesembuhan secepatnya, dan menghimbau kepada keluarga yang sanak saudaranya belum ditemukan, harap tetap bersabar dalam menghadapi musibah ini.

"Tentu saja, inilah adalah ujian bagi kita semua. Meski demikian, di balik semuanya, seluruh pihak seharusnya menyerahkan seluruh penanganan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik dari Pihak Kepolisian, Pihak KNKT maupun Pihak Basarnas," jelasnya. ■

(coba.mp), Foto: Anand/br



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN PELAKSANA Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto
ANGGOTA REDAKSI Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN Djujawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi)

STAFF PRODUKSI Eko Muryanto, Barliansyah, Fathurrahman, Mujiono

SIRKULASI Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNG BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Kemkominfo Diminta Tidak Diskriminatif Lakukan Pemblokiran Media

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon sangat menyesalkan tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang kembali melakukan pemblokiran terhadap situs berita yang dianggap menyebarkan konten ilegal. Ia menjelaskan tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang itu melanggar konstitusi dan mengancam kebebasan berpendapat. Hal itu diungkap dalam rilis yang diterima Parlemen pada Rabu, (04/01).

“Tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang, selain dapat melanggar konstitusi, juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini menekankan kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah

ditetapkan. “Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran,” jelas Fadli.

“Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif,” sambungnya.

Politisi asal dapil Jabar ini juga menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur

bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.

Fadli juga menekankan bahwa hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Namun ini tidak dilakukan dan bahkan dibiarkan.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini juga meminta agar Kominform tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. “Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara,” tutup Fadli. ■



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

(b), Foto: Anandito

Laporkan Kelompok Radikal ke Polisi

Ketua DPR RI, Setya Novanto sangat mengapresiasi kinerja Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam mengantisipasi tindakan terorisme pada momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Dia juga mewanti-wanti agar segenap lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu tugas kepolisian dalam pemberantasan terorisme.

“Saya kembali mengingatkan perkataan Pak Tito beberapa waktu lalu yang meminta kita semua untuk tetap waspada, karena potensi dan ancaman serangan terorisme masih berkeliaran di sekitar kita. Mereka mungkin ada di sekitar kita, tapi tidak dapat kita sangka dan duga, tidak kita ketahui. Segera laporkan ke petugas kepolisian jika melihat orang-orang atau kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, untuk mengantisipasi

kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan,” tandas Novanto dalam rilis yang diterima Parlemen, Selasa (27/12).

Sebagai Pimpinan DPR RI yang juga mewakili Rakyat Indonesia, dia mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Polri yang benar-benar bekerja keras, tak pernah berhenti, pagi siang sore dan malam, 24 jam dalam sehari. Penggrebekan teroris waktu lalu, semakin menunjukkan bahwasannya kelompok

radikal ini benar-benar ada dan bukan pengalihan isu. “Sekali lagi saya tekankan bukan pengalihan isu,” tegas Novanto.

Dia mengatakan, kelompok radikal ini benar-benar ada dan sangat berbahaya. “Jujur saya kagum dan sangat mengapresiasi kinerja Polri di bawah kendali Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, khususnya dalam mengantisipasi aksi radikal seperti terorisme, sebelum mereka melakukan tindakan atau aksi yang saya pastikan,

rakyat-lah yang akan menjadi korban," ungkap Novanto.

Terlebih lagi teroris yang digrebek saat itu, ternyata akan melakukan aksinya pada Natal dan perayaan malam tahun baru. Rakyat semua tentunya tidak dapat membayangkan apa jadinya dan berapa banyak korban yang tewas dan terluka, jika kelompok radikal ini tidak ditangkap oleh petugas.

Sebelumnya pada Ahad (25/12), Tim Densus 88 Polri kembali menggrebek markas teroris di rumah terapung Waduk Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat, dua tersangka teroris terpaksa ditembak karena melawan. Sebelumnya dua tersangka teroris lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup oleh



Ketua DPR RI, Setya Novanto

petugas di lokasi berbeda.

Ketua Umum Golkar ini sangat memahami, bahwa setiap agama

membawa misi kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena itu, jika substansi Natal dapat dipahami dalam konteks kehidupan kebangsaan dan keindonesiaan saat ini, masyarakat akan semakin mengerti betapa pentingnya suasana hidup yang harmoni, saling menghargai, saling menghormati dan saling mengasihi.

"Terakhir saya kembali mengucapkan terimakasih kepada Polri atas kesigapannya, pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga, terimakasih sudah menjaga dan selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi Rakyat Indonesia. Bagi saya, Polri is number one di dunia," kata Setya Novanto menegaskan. ■

(eko.mp), Foto: Andri/br

DPR RI Apresiasi Kinerja Ekonomi Pemerintah

DPR RI mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam mengelola anggaran negara hingga mendekati target APBN yang telah ditetapkan. Hal itu seiring telah disampaikannya laporan tentang realisasi APBN-P 2016 oleh Kementerian Keuangan. Apresiasi tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan dalam rilis yang diterima Parlemen Selasa, (03/01).

“Meski gejolak ekonomi dalam negeri yang tidak terlepas dari gejolak ekonomi global yang masih fluktuatif, kita masih mampu menunjukkan stabilitas yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016 yang ditargetkan sebesar 5,2 persen, dicapai sebesar 5 persen di akhir tahun,” ujar Taufik.

Sesuai prediksi, Indonesia mampu merealisasikan nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.307 per dolar AS menguat dibandingkan asumsi sebelumnya sebesar Rp133.500 per dolar AS. Sementara itu, Indonesia juga mampu merealisasikan belanja negara sebesar Rp1.859,5 triliun atau sekitar 89,3 persen.

Secara umum, Indonesia juga mampu menjaga defisit anggaran pada batas yang disepakati dalam APBN, yakni tidak lebih dari 3 persen. Realisasinya, defisit APBN-P 2016 sebesar 2,46 persen. "Sementara itu, realisasi pajak masih kita akui belum sesuai ekspektasi kita dikarenakan banyak

faktor. Namun secara umum mengalami pertumbuhan 4,2 persen, walaupun dalam hal realisasi masih rendah Rp33 triliun dari target yang dicanangkan sejak Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabat," ujar Taufik.

Taufik berharap pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,5 persen di tahun 2017 dapat tercapai, Karena sinyal-sinyal perbaikan ekonomi semakin nampak dan ini perlu untuk mendapat dukungan dari banyak pihak.

Kondisi ini semua menunjukkan bahwa situasi ekonomi dalam negeri masih terkendali. Meski pada hari ini pembukaan IHSG ditandai dengan pelemahan sebesar 0,35 persen atau 179 poin ke level 5.278,8. Namun, dia optimis, mengingat Indonesia termasuk negara yang cukup gemilang lantaran masuk 5 besar di dunia dalam pencapaian pasar modal.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

"Realisasi APBN 2016 harus menjadi acuan bersama untuk terus bekerja keras. Intinya, kita harus realistis. Pemerintah tidak boleh muluk-muluk dalam menetapkan target pertumbuhan. Setiap saat jika mendesak, harus dikoreksi, meski hal tersebut disesuaikan dengan kerja keras kita semua," pungkas Taufik. ■

(bu.mp), foto: nusehro/br

Kebebasan Demokrasi Bukan untuk Menyerang

Mencermati perkembangan teknologi informasi yang beredar di media sosial akhir-akhir ini, tidak semua menyajikan kebenaran dan fakta-fakta yang mendukung bagi kebutuhan informasi publik. Media sosial yang menyajikan informasi secara massif sejatinya mampu mencerahkan logika dan opini publik, justru banyak diisi oleh isu-isu dan kabar-kabar tidak benar.

Ketua DPR RI Setya Novanto berseru agar kebebasan dalam demokrasi mengedepankan keadaban dan tidak mendeskreditkan pihak lain. Kebebasan bersuara dan berpendapat memang dijamin undang-undang. Namun kebebasan tersebut tidak harus kebablasan, sehingga menabrak aturan-aturan logis, fakta yang sebenarnya, rasionalitas publik dan kehilangan pertanggungjawaban.

"Kebebasan sebagai pengejawantahan nilai demokrasi tidak disalahgunakan untuk menyerang, merendahkan dan mendeskreditkan pihak lain," ujar Novanto dalam rilis yang diterima Parlemen, Jumat (30/12).

Dia juga memberikan dukungan yang serius pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum menindak tegas penyebar kebencian melalui media sosial.

"Saya mendukung sepenuhnya pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo yang meminta aparat untuk menindak tegas penyebar kebencian melalui media



Ketua DPR RI, Setya Novanto

sosial. Apalagi saya mengamati akhir-akhir ini memang banyak berita yang tidak faktual dan tidak benar, terkait banyak hal, bahkan berani menyasar langsung ke Bapak Presiden Joko Widodo, terkait pemerintah secara institusional serta secara personal, dan terkait isu-isu terkini," paparnya.

Menurut Novanto, penyebaran kabar yang tidak benar ini sudah memasuki wilayah fitnah dan memancing persepsi

publik yang salah. Menyisakan kegelisahan dan kekhawatiran serta mengaduk-aduk emosi publik. Terlebih dari itu, penyebarannya tidak bertanggung jawab. Masalah ini telah berpotensi merenggangkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan sebagai sesama anak bangsa.

"Dalam kesempatan ini, kembali saya mengingatkan kepada kita semua pada komitmen bersama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, sehingga sudah sepatutnya penyebaran kebencian melalui media sosial untuk segera dihentikan dan ditindak keras oleh penegak hukum jika hal tersebut masih terjadi," harap Ketua Umum Golkar ini.

Karena itu sebagai Ketua DPR RI, Novanto mengharapkan seluruh Rakyat Indonesia untuk senantiasa jeli dan teliti dalam melihat, membaca dan memahami berbagai isu, opini dan berita di media sosial yang beredar. Sebagai sesama anak bangsa, dia mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi persaudaraan atas dasar kebangsaan. ■

(kbo,mp) foto: Iwan/br

Banyak PR Bidang Kesehatan yang Belum Rampung

Menyambut tahun 2017, banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum rampung dilakukan pemerintah di bidang kesehatan. Dari mulai sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang belum terbit, antisipasi laju pertumbuhan penduduk, hingga layanan BPJS Kesehatan yang juga masih bermasalah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati menyampaikan beberapa catatan kritis menyambut awal tahun 2017 ini dalam rilisnya yang diterima Parlemen Senin (2/1). Ada beberapa UU bidang kesehatan yang sudah disahkan DPR, namun belum memiliki PP. Padahal PP tersebut sangat penting dalam politik kesehatan yang pro publik. Komitmen pemerintah hingga kini terus ditagih untuk segera

menerbitkan PP.

Beberapa UU bidang kesehatan, ungkap politisi PPP ini, yang belum memiliki PP adalah UU Kesehatan Jiwa, UU Rumah Sakit, dan UU Keperawatan. "Kami meminta pemerintah agar memasukkan sejumlah PP tersebut dalam rencana program pembentukan PP pada tahun 2017." Masalah lain adalah soal laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Butuh koordinasi antara pusat dan daerah

untuk menekan angka jumlah penduduk. Rencana sentralisasi petugas layanan KB yang ditangani langsung BKKBN pada 2017 perlu segera dikonkretkan.

Di sektor layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, dinilai Okky, masih kurang responsif terhadap para pasien yang menggunakan kartu JKN dari BPJS Kesehatan. "Kesan peserta BPJS Kesehatan sebagai pasien kelas dua masih muncul. Mestinya, segera diubah oleh



Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokarwati

seluruh petugas kesehatan. Tahun 2017 persoalan tersebut diharapkan tidak muncul kembali. Bagaimana pun peserta BPJS Kesehatan bukanlah pasien yang gratisan. Mereka tiap bulan mengiur premi BPJS Kesehatan," tegas Sekretaris Dewan Pakar PPP tersebut.

Pada bagian lain, Okky menyoal dokter layanan prima (DLP) yang mewajibkan para dokter kembali menjalani pendidikan khusus selama dua tahun. Menurutnya, praktik di sejumlah negara, para dokter tidak diminta masuk pendidikan kembali. Yang ada hanya diminta magang setiap

kali praktik berbagai spesialis selama 2-3 tahun. "Pemerintah mestinya membuka ruang dialog dengan dokter dan asosiasi dokter terkait polemik DLP ini. Jangan sampai persoalan ini mengganggu layanan dokter kepada para pasien," harap Okky.

Pada bagian terakhir, politisi dari dapil DKI II itu, menyerukan kepada pemerintah, partai politik, ormas, perusahaan, dan elemen lainnya, agar mempraktikkan kesetaraan gender. Perempuan perlu dilibatkan dalam ruang publik untuk memberi warna dan sentuhan khas perempuan yang sarat kepedulian dan tanggung jawab. Tak boleh ada lagi diskriminatif terhadap perempuan dan tak boleh pula dipandang sebagai pelengkap atau warga kelas dua. ■

(mb) foto: ddb/br.

Anggota Komisi V DPR RI Sesalkan Ketidakhadiran Gubernur NTB Saat Kunjungan DPR RI

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady menyesalkan ketidakhadiran Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat) saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi tersebut, Senin (19/12).

“ Saya sangat kecewa, hampir lima puluh persen anggota kami (komisi V) dan dari seluruh fraksi menyempatkan hadir di NTB, tapi Gubernur tidak ada. Apakah Pemerintah Provinsi NTB sudah tidak membutuhkan DPR RI, ”

ungkap Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. Padahal, tambah Hamka, Gubernur dapat memanfaatkan keberadaan DPR RI di daerah tersebut untuk memberikan masukan dan paling tidak menjelaskan *master plan* daerahnya. Termasuk hal-hal yang sudah dicapai dan hal-hal yang belum dicapai. Sehingga dalam proses penganggaran nanti, DPR RI dapat memberi masukan kepada pemerintah pusat, terkait daerah mana saja dan apa saja yang harus didorong dari daerah tersebut. "Kita tidak tahu apa yang menjadi kendala daerah ini. Karena konon tingkat kemiskinan di daerah ini lebih dari 16 persen. Seharusnya Gubernur bisa memberi

masukan kepada kami, apalagi beberapa diantara anggota Komisi V yang hadir di NTB ini juga merangkap sebagai anggota badan anggaran di DPR RI. Jadi keberadaan kami tolong jangan dianggap sebelah mata. Toh, kami juga tidak merepotkan Gubernur," tambahnya.

Pada kesempatan itu Hamka bersama 20 orang anggota Komisi V DPR RI lainnya juga mengunjungi beberapa desa di NTB. Salah satu temuan dari kunjungan kerja Komisi V kali ini adalah masih adanya desa di NTB yang belum menerimanya dana BUMdes (badan usaha milik desa) yang disebabkan karena pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Komisi V mendorong agar pencairan dana BUMdes segera dilakukan. Karena dana BUMdes tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa lewat pengembangan potensi yang ada di desa tersebut. ■

(gny), Foto: Ayo/br.



Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady

Jangan Ulangi Manifes Abal dan Pelanggaran SOP dalam Pelayaran

Manifes atau daftar penumpang abal-abal pada Kapal Mesin Zahro Express menjadi persoalan yang serius dalam dunia pelayaran Indonesia. Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniarwan mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakprofesionalan para nakhoda dan kapten kapal. Manifes abal-abal dan pelanggaran standard operational procedures (SOP) menjadi penekanan dalam kasus ini, jangan sampai terulang lagi dalam dunia pelayaran nasional.

“ Saya sangat kecewa dan prihatin dengan insiden ini. Apalagi masalah manifest abal-abal yang kembali terjadi untuk kesekian kalinya dalam dunia pelayaran kita,” ujar Taufik Senin, (02/01).

Untuk manifest, patut diduga ada permainan, karena oknum di kapal atau siapapun bisa mendapatkan pemasukan lebih dari penumpang yang digelapkan. Padahal penumpang gelap tidak mendapatkan hak asuransi. "Bukannya seluruh penumpang angkutan umum mendapatkan asuransi, dari situ saja sudah merugikan hak penumpang," kata Taufik.

Dia menilai, jumlah penumpang yang melampaui kapasitas kapal merupakan pelanggaran SOP. Sebagaimana dilansir pada media massa, manifest KM Zahro tercatat penumpang 100 orang, ternyata tidak sesuai dengan realitasnya, sekitar 180 orang.

Jumlah penumpang KM Zahro Express meskipun tidak melampaui kapasitas kapal, kata dia, tetapi banyak penumpang yang tidak tercatat dalam manifest sehingga sulit mendapatkan klaim asuransi.

"Daftar manifes KM Zahro ternyata abal-abal alias palsu atau ga bener dari data sebenarnya. Tercatat 100 padahal ada 180 penumpang di kapal tersebut. Meski belum *over load*, tapi ini bentuk pelanggaran berat dan sudah melanggar SOP," papar Taufik.

Dia pun merasa geram dengan nakhoda dan kapten kapal KM Zahro Express. Seharusnya memiliki kewajiban mengutamakan keselamatan para penumpang justru malah melarikan diri terlebih dulu, mengabaikan keselamatan penumpang. Padahal dua profesi ini lebih paham soal evakuasi dan penyelamatan

penumpang, kalau saja nahkoda dan kapten memberikan pertolongan pertama jumlah korban tentu bisa diminimalisir.

"Saya mendapatkan info jika dia loncat duluan ke laut menyelamatkan diri. Ini pelanggaran berat etika profesi. Memalukan, sangat memalukan. Seharusnya dia yang memimpin evakuasi dan penyelamatan penumpang, eh malah kabur duluan," ketus Taufik.

Pimpinan DPR RI Korekku ini menyarankan agar Kecelakaan KM Zahro Express, segera ditangani oleh Basarnas, Kepolisian, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT). Ia tak lupa mengimbau lembaga berwenang untuk terus melakukan pengawasan di pelabuhan, menegakkan SOP, serta melakukan audit secara menyeluruh pada dunia pelayaran.

Atas meninggalnya 23 orang penumpang, dan penumpang yang mengalami luka-luka, Taufik menyampaikan keprihatinan dan luka mendalam. "Semoga Allah menghapus dosa dan menerima seluruh amal ibadah para korban sehingga mendapatkan tempat layak di sisi Nya, serta keluarga yang ditinggalkan tetap kuat dalam menghadapi cobaan ini, dan korban yang luka segera sembuh dari luka-lukanya," paparnya.

Dia juga meminta seluruh petugas dan relawan yang melanjutkan proses pencarian korban kapal untuk mengutamakan keselamatan. Taufik juga menyampaikan, Komisi V DPR RI akan segera melakukan evaluasi terkait kecelakaan kapal ini.

"Sebagai Pimpinan DPR RI, saya



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniarwan

berharap Komisi V segera memanggil pihak-pihak terkait dalam insiden ini, untuk mencari solusi agar kejadian pilu ini tidak terulang kembali," jelas Taufik. ■

(kha.mpi), Foto: Iwan/br

Penyelamatan KM Zahro Tidak Maksimal



Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono

Komisi V DPR RI Soroti Pembangunan Bandara Radin Inten II

Anggota tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Yudi Widiana Adia menyoroti sejumlah hal terkait pembangunan Bandara Radin Inten II di Lampung.

“ Kita melihat *problem* yang ada di bandara Radin Inten II Lampung ini yang dalam proses pembangunan. Tadi saat kami tiba, saya melihat masih berantakan, namun di lain sisi bandara telah melakukan pelayanan terhadap penerbangan,” kata Musa Zainuddin usai melakukan pertemuan dengan Wagub Lampung beserta jajaran, di Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Senin (19/12).

Musa menambahkan pembangunan berkelanjutan bandara akan dilakukan tahun depan karena sudah menjadi semacam komitmen antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov Lampung sendiri, termasuk juga akan membangun *skybridge* yang terintegrasi dengan jalur kereta api.

Untuk VIP bandara, ujar Musa, sesuai dengan yang Kemenhub inginkan, agar menjadi satu dilokasi Bandara dan tidak terpisah seperti saat ini.

"Tadi Pemprov sudah menyetujui,

tinggal nanti pelaksanaannya saja, mudah-mudahan tahun depan sudah siap untuk dibongkar (VIP lama-red). Pembongkarannya pun dilaksanakan oleh Pemprov sendiri, dan kalau sudah akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan," jelas politisi dari Fraksi PKB ini.

Perihal Angkasa Pura II akan mengambil alih Bandara ini, Musa berpendapat agar jangan terlalu terburu-buru, sambil melihat kesiapan secara keseluruhan apakah sudah optimal.

"Khusus Bandara Radin Inten II saat ini aset sebagian besar dimiliki oleh Pemda. Apakah Pemda setuju untuk menghibahkan bandara ini ke Angkasa Pura II, pasalnya sesuai yang tadi disampaikan Gubernur melalui Wagubnya, yang berharap agar Bandara Radin Inten



Anggota Komisi V DPR RI, Musa Zainuddin

II menjadi bandara embarkasi haji dan mampu melakukan penerbangan international," terang Musa.

"Masih banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti fasilitas-fasilitas penunjang, saran saya ke depan jangan terlalu terburu-buru," lanjutnya. ■

terbakarnya kapal. Ini tidak boleh dilakukan Polair, karena di Kemenhub ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil," terangnya.

Seharusnya, lanjut Anggota F-Gerindra DPR RI ini, kru atau ABK kapal membimbing penumpang agar melakukan penyelamatan dengan memberi alat keselamatan. Harus ada pengarahan yang memadai kepada para penumpang dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

"Harus ada pengarahan dari nahkoda dan kru untuk penumpang. Harus meninggalkan kapal, sambil diyakinkan agar menggunakan alat keselamatan. Di kapal harus ada *life craft*. Jadi, kalau di laut bisa mengembang seperti perahu karet," tandasnya. ■

Menyusul insiden terbakarnya kapal motor (KM) Zahro Express di perairan Muara Angke, penyelamatan atas kapal tersebut dinilai tidak maksimal. Ironis, kapal yang terbakar tidak jauh dari pelabuhan itu, justru diselamatkan para nelayan, bukan Bakamla, Basarnas, atau Polair.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1), menyoroti insiden tersebut. Pertolongan internal dan eksternalnya tidak berjalan efektif. Padahal, jaraknya hanya 1,8 km dari pelabuhan.

"Kemarin dilakukan pertolongan 20

menit setelah kejadian. Yang melakukan pertolongan adalah nelayan. Padahal, kapal mengalami kecelakaan hanya 1,8 kilometer atau 1 mil dari jarak pelabuhan yang sebenarnya sangat dekat," kata Bambang yang juga anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Bambang mencontohkan, di Filipina bila terjadi kecelakaan serupa, petugas sudah berada di lokasi kejadian lima menit setelah insiden. Basarnas, Bakamla, dan Polisi Perairan (Polair) dinilai lambat memberikan pertolongan hingga kapal ludes terbakar dan menelan banyak korban jiwa.

"Basarnas tidak bergerak waktu awal. Sampai 20 menit setelah kejadian, justru ada nelayan. Bakamla tidak bergerak. Bergeraknya lambat. Yang sedikit tanggap adalah Polair, tapi kurang cepat. Polair justru lebih ke arah mencari penyebab

Plt Sekjen Apresiasi Program Kegiatan P3S DPR RI

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR RI, Achmad Djuned mengapresiasi program kegiatan yang dilakukan Persatuan Pegawai Pensiunan Setjen (P3S) DPR RI dari kegiatan kerohanian, wisata dan kesenian.

“ Yang paling membahagiakan adalah mengunjungi anggota yang sakit dan takziah kepada yang meninggal dunia. Di saat sedih dan sakit, betapa bahagia dan terharu menerima kunjungan teman-teman beserta doa kesembuhan. Begitu pula saat takziah, didoakan agar diakhir hayatnya khusnul khotimah,” katanya saat menyampaikan sambutan para Rapat Tahunan dan Pertemuan Berkala ke-1 tahun 2017 P3S di Ruang KK I Gedung DPR RI Senayan, Rabu (4/1).

Banyaknya kegiatan, menurut Achmad Djuned berarti organisasi P3S hidup dan berkembang. Sesuai laporan yang disampaikan Ketua P3S Toip Heryanto, banyak kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 baik oleh seksi usaha dan jasa, seksi sosial, seksi kesenian dan rekreasi serta kerohanian.

Ditambahkannya, Setjen DPR RI juga menyelenggarakan upacara pelepasan pegawai yang akan masuk purna tugas. Para pegawai yang memasuki masa pensiun berarti "pindah rumah", kalau sebelumnya dibawah pembinaan Setjen DPR RI namun setelah pensiun maka pembinaannya adalah P3S. Dalam upacara pelepasan sekaligus dilakukan penyerahan uang



Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR RI, Achmad Djuned bersama para pensiunan pegawai DPR RI

iuran 1 tahun penuh kepada anggota pegawai yang purna tugas.

" Termasuk saya pada tahun ini bersama 30 pegawai Setjen DPR RI akan memasuki masa pensiun pada bulan Oktober mendatang," ungkap Djuned.

Kepada para Pengurus dan anggota P3S yang hadir dalam acara ini, Achmad Djuned juga menyampaikan rencana mengundang para pensiunan ini bisa berlibur dan menginap di Wisma Kopo, Bogor. "Sekali-sekali akan kita undang menginap di Kopo sebagai upaya tetap menyambung silaturahmi sekaligus menimba pengalaman para pegawai yang

masih aktif kepada seniornya," ia menambahkan.

Dalam acara ini Ketua P3S Toip Heryanto menyerahkan penghargaan kepada mantan Sekjen Winantuningtyastiti dan Slamet Sutarsono mantan Deputy Administrasi atas jasa-jasa terhadap P3S.

Hadir dalam acara ini para pejabat Setjen DPR RI Irtama Setyanta Nugraha, Deputy Persidangan Damayanti, Kepala Biro Pimpinan YOITahapari, Kepala Biro Kepegawaian Biro Kepegawaian & Organisasi Nunu Nugraha Khuswara, Kepala Pusat Diklat Rahayu Setyawardani dan Kepala Bagian Media Cetak Media Sosial Mohammad Djazuli.

Sedangkan Pembina P3S yang hadir diantaranya mantan Sekjen Winantuningtyas Titi Swasanany, Faisal Djamal dan Nining Indra Saleh, serta mantan Wasekjen Edo Wasdi. Acara pertemuan berlangsung hidmat hingga akhir acara dengan ceramah Ustadz H. Rusmono yang mengambil tema Manajemen Kematian. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang paling cerdas, yaitu orang yang ingat akan mati dan paling baik persiapannya. ■

(mp). Foto: Jakarta

Anggota Komisi III DPR RI Nilai Positif Penerbitan PP tentang PNBP di Lingkungan Polri

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menilai positif terkait penerbitan PP No. 60 Tahun 2016 tentang penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Polri pengganti PP NO. 50 tahun 2010.

“ Menurut saya PP tersebut bagus dan lebih transparan. Meskipun di satu sisi terkesan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai upaya agar kenaikan tarif tersebut tidak berdampak secara ekonomis bagi masyarakat,” ungkap Nasir Djamil melalui pesan singkatnya kepada Parlemenaria, Rabu (4/1).

Ada sebagian orang yang menilai PP tersebut dikeluarkan secara sepihak tanpa

terlebih dahulu membicarakan kepada DPR RI selaku wakil rakyat. Terkait hal itu, Politisi dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa PP atau Peraturan Pemerintah merupakan domain pemerintah. PP tidak pernah dibahas bersama DPR RI.

"Kalaupun ada masyarakat menilai bahwa penerbitan PP itu melanggar hukum, HAM atau hak-hak publik lainnya, maka masyarakat bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Karena PP tidak



Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

pernah dibahas bersama DPR RI," jelasnya.

Sebagaimana beredar di masyarakat, tanggal 6 Desember 2016 lalu Pemerintah telah mengundang PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP 60/2016 ini menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan atau tanggal 6 Januari

2017. Dengan berlakunya PP 60/2016 ini, terdapat penambahan jenis PNPB yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK untuk kendaraan roda empat atau lebih yang semula hanya Rp75 ribu, meningkat menjadi Rp200 ribu.

Kenaikan cukup tinggi untuk layanan penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah. PP terdahulu surat mutasi ke luar daerah hanya Rp75.000 untuk semua jenis kendaraan, sekarang tarifnya Rp150.000 untuk kendaraan

bermotor roda 2 atau roda 3 serta kendaraan bermotor roda 4 atau lebih mencapai Rp250.000.

Begitu juga dengan penerbitan BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) yang semula hanya Rp80 ribu untuk kendaraan roda 2 dan 3 menjadi Rp225 ribu. Sementara untuk roda 4 atau lebih yang awalnya Rp100 ribu, meningkat menjadi Rp375 ribu. Serta beberapa PNPB lainnya di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. ■

(Ayu), Foto: Arif/br.

Tuntaskan Digitalisasi Sektor Ekraf Pada 2017

Memasuki tahun baru 2017 persoalan yang selama 2016 belum tuntas diharapkan dapat selesai di tahun 2017. Digitalisasi di sektor ekonomi kreatif (Ekraf) seperti musik, film, penjualan buku serta hak kekayaan intelektual lainnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermanyah mengatakan tahun 2017 semua urusan terkait dengan sektor Ekraf harus masuk dalam sistem digital. Langkah ini, menurut dia sebagai upaya untuk melakukan transparansi. "Dengan digitalisasi sistem ini akan berdampak pada transparansi. Ujungnya pada peningkatan pendapatan negara serta penguatan kepada pelaku kreatif," ujar Anang di Jakarta, Kamis (29/12).

Musisi asal Jember ini mencontohkan sistem digitalisasi yang dimaksud seperti di sektor musik yang harus diketahui secara persis oleh pelaku industri musik mulai dari pencipta lagu serta penyanyi kapan dan dimana lagunya diputar baik di rumah karaoke, restoran, pusat perbelanjaan dan lain-lain yang erat kaitannya dengan pembayaran royalti. "Aturannya sudah ada di UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sayang sampai hari ini belum ada aturan operasional yang detail," papar Anang.

Hal yang sama, imbuh Anang, juga diterapkan dalam industri perfilman di Indonesia. Menurut dia, saatnya Indonesia menerapkan sistem *box office* untuk mendapat pemetaan yang akurat tentang

penyebaran film yang tengah diputar. Tidak sekadar itu, dengan sistem ini, distribusi film akan transparan dan akuntabel. "Efek positifnya, penerimaan negara melalui pajak dari sektor film akan akuntabel dan transparan. Dengan sistem ini juga akan



Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermanyah

menguntungkan bagi pelaku industri film mulai dari pemain film, sutradara, produser dan seluruh pihak yang terlibat," terang Anang.

Anang berharap, pemerintah bertindak serius untuk membereskan agenda digitalisasi sistem terkait dengan hak cipta dan karya intelektual. Langkah tersebut mestinya bisa dilakukan asal ada kehendak politik yang kuat dari pemerintah. "Seperti persoalan pungli saja bisa dibereskan, masa

perkara akuntabilitas dalam hak cipta tidak bisa dilakukan? Jika mungkin, Presiden bisa turun tangan juga untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena sektor ini terkait dengan daya saing kita dengan negara-negara lainnya. Ini soal marwah dan martabat Indonesia," tandas Anang.

Menurut dia, persoalan pembajakan produk karya intelektual seperti musik dan film hingga saat ini masih mudah dijumpai di lapangan. Padahal, ia mengaku sejak lama telah menyuarakan pemberantasan pembajakan ini. "Tapi faktanya pembajakan secara demonstratif mudah ditemukan di pasaran. Pelaku pembajakan benar-benar melecehkan hukum dan aparat penegak hukum. Saya paham mengapa masih terjadi pembajakan, karena aktor intelektualnya belum ditindak sampai detik ini," ucap Anang.

Anang mengutip data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) pada tahun 2014 mengungkapkan kerugian industri sebesar Rp12,6 triliun serta kerugian negara melalui pajak sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut terdiri dari pembajakan fisik, pembajakan digital, penyalahgunaan konten di rumah karaoke serta hak-hak pertunjukan di televisi dan radio. "Saya meyakini, jika sistem pengawasannya *real time* melalui *online* penyelewengan disektor ini akan dapat ditekan," tutup Anang. ■

(de), Foto: Ekraf/br

Parlemen Korsel Konsultasi Sistem Keamanan di DPR RI

Parlemen Korea Selatan berkonsultasi sistem keamanan di DPR RI pada Rabu, (28/12). Kehadiran delegasi Parlemen Korea Selatan itu disambut oleh Plt Sekretaris Jenderal DPR RI, Ahmad Djuned serta didampingi oleh Deputi Persidangan, Damayanti dan jajaran pejabat eselon I dan II Sekjen DPR RI.

“ Parlemen Korea Selatan berkeinginan untuk bertukar pikiran yang berkaitan dengan keamanan. Karena mereka melihat pengamanan di DPR RI sangat bagus,” ujar Achmad Djuned kepada Parlemenaria di sela-sela acara tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI seringkali mendapatkan aksi unjuk rasa yang dilakukan



Plt Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned

masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga hal tersebut membutuhkan sistem pengamanan yang kuat.

"Kehadiran mereka juga untuk mengetahui manajemen kesekjenan DPR RI dalam menangani aksi unjuk rasa," tutur Djuned.

Aksi unjuk rasa adalah hal yang tidak bisa diabaikan dalam negara demokrasi, terlebih Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat sedunia. Dalam kesempatan tersebut Ketua Rombongan Parlemen Korea Selatan Lee Kang Bong juga mengapresiasi demokrasi yang ada di Indonesia. Ia pun mengatakan Parlemen Korsel sedang dalam proses memperkuat sistem keamanan.

"Parlemen Korsel sedang berupaya keras memperkuat keamanan. Kami fokus pada

memperkembangkan dan memperkuat. Oleh karenanya kami datang ke Indonesia," ujar Lee.

Achmad Djuned pun juga mengapresiasi kehadiran Parlemen Korsel serta diharapkan negara luar dapat lebih mengenal sistem pendukung di DPR RI. "Dianggapnya sudah cukup bagus. Kalau soal IT coba digabungkan dengan keamanan. Kami lihat Korsel memandang penting Indonesia khususnya berkaitan dengan demokrasi. Insya Allah keamanan DPR RI menjadi *role model* negara lain," jelas Djuned.

Pengamanan di DPR RI pun juga memperhatikan lingkungan sekitar, mengingat keberadaan DPR RI berada dalam satu kompleks dengan DPD dan MPR. "Pengamanan di DPR RI ini juga memperhatikan lingkungan sekitar. Karena selain DPR RI juga ada DPD dan MPR yang berada dalam satu kompleks," tutup Djuned. ■

(bs), Foto:arif/mr.

Komisi X DPR RI Serap Aspirasi ke Babel

Komisi X DPR dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung. Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi Undang-Undang dan kebijakan yang dilakukan, serta menggali dan menyerap aspirasi dari daerah.

“ Terutama terkait dengan data-data faktual dan berbagai persoalan mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, riset teknologi dan pendidikan tinggi, pariwisata, pemuda dan olahraga, perpustakaan, serta ekonomi kreatif,” jelas Fikri, saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Babel dan pihak terkait di ruang pertemuan Pasirpadi Kantor Gubernur, di Air Itam, Pangkalpinang, Jum'at (16/12).

Politisi F-PKS itu menambahkan, saat ini pihaknya sedang membahas Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan. Usai mendengar penjelasan dari pihak terkait yang

menjadi bidang kerja Komisi X, Fikri memastikan pihaknya akan mendorong Pemerintah melalui fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

"Hal-hal apa yang menghambat pertumbuhan, akan kami dorong sesuai fungsi legislasi dan anggaran. Selain itu, yang terpenting adalah memastikan serapan aspirasi dari bawah kami terima untuk dibawa ke rapat kerja dengan Kementerian terkait," jelas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi Arzeti Bilbina. Politisi F-PKB itu mendapatkan masukan terkait bidang kerja Komisi X. "Tadi



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menerima laporan dari Pejabat Pemprov Babel

juga banyak disinggung khususnya masalah Kepemudaan dan Keolahragaan, misalnya mengenai sarana fasilitas *sport center*," imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Amrullah Harun mengatakan, terus melakukan pembenahan dan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan menuju kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah Provinsi Babel juga berupaya meningkatkan kemampuan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap perubahan pola pikir, budaya kerja, serta kinerja aparatur yang berbasis kompetensi, meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kerja melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat.

"Begitu juga dengan koordinasi, menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dengan provinsi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat," kata Amrullah.

Ia menambahkan, keberadaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yakni Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Politeknik

Manufaktur (Polman), secara umum memiliki persoalan utama diantaranya sarana-prasarana belum memenuhi standar, ketersediaan jumlah dosen, alih status karyawan. Dirinya berharap, tiga hal itu segera dapat diselesaikan.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Anggota Dewan antara lain Puti Guntur Soekarno SIP (F-PDIP), Ismayatun (F-PDIP), Dr Sofyan Tan (F-PDIP), Dr Marlinda Irwanti SE MSi (F-PG), Ir H Nuroji (F-Gerindra), Ir Sri Meliyana (F-Gerindra), Muslim SH MM (F-PD), Venna Melinda SE (F-PD), Arzeti Bilbina SE MAP (F-PKB), dan Drs H Anwar Idris (F-PPP). ■

(br), foto: da binarabr

Skema Kontrak *Gross Split* Harus Diuji Publik

Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu secara cermat penerapan skema *Gross Split* dalam hitung-hitungan baru kontrak migas. Pengkajian itu dapat dilakukan dengan cara melakukan uji publik bersama pemangku kepentingan di sektor migas.

Rofi menilai Skema *Gross Split* jika diperhatikan cukup banyak mendapat kritikan dari banyak kalangan. Hal itu terutama dari kalangan asosiasi, pegiat *energy*, maupun Dewan Energi Nasional (DEN). Kritikan itu muncul karena dianggap tidak selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"Ada baiknya Pemerintah duduk bersama dan melakukan uji publik untuk mengkaji permasalahan ini secara komprehensif dan serius, agar ditemukan solusi terbaik," jelas Rofi di Jakarta, Kamis (29/12).

Seperti diwartakan, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema *Gross Split* untuk kontrak baru migas. Skema yang direncanakan akan diterapkan pada awal tahun 2017 ini untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC) yang selama ini digunakan.

Rofi menjelaskan, Skema *Gross Split* pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan administrasi aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas. Namun, Rofi menilai, jangan sampai skema *Gross Split* ini dapat membuat peran negara atas SDA yang dimilikinya jadi berkurang dari 85 persen ke 50 persen.

Bahkan, tambah Rofi, apabila nanti skema *Gross Split* diterapkan, harus dipastikan keuangan negara tidak terganggu bila terjadi perubahan sistem.

"Jangan sampai skema *Gross Split* ini diterapkan hanya untuk semata-mata menutupi *shortfall* pajak dan kerumitan sistem *cost recovery*. Sejatinnya bisa jadi *Gross Split* dalam waktu singkat memang akan meningkatkan pendapatan negara, namun sangat mungkin jika tidak dicermati akan mengorbankan potensi kekayaan alam

Indonesia," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.

Bahkan, Rofi mendesak perlu adanya kepastian bahwa sistem apapun yang diterapkan, Negara harus hadir sebagai pemegang kekuasaan kekayaan alam Indonesia. "Negara tidak boleh ditempatkan sejajar dengan kontraktor," tegas Ketua Kelompok Komisi VII Fraksi PKS DPR RI ini.

Oleh karena itu, sebelum memberlakukan skema *Gross Split*, Pemerintah perlu melakukan simulasi perhitungan pendapatan negara. Jangan sampai, tegas Rofi, penerimaan negara dengan skema *Gross Split* malah berkurang dibanding dengan sistem PSC.

"Simulasi ini juga harus memperhitungkan efek pajak yang dibebankan pada kontraktor berupa *corporate income tax* dan *branch profit tax*. Hal ini penting untuk menjaga tingkat profitabilitas kontraktor yang akan berpengaruh besar dalam menumbuhkan minat dan iklim investasi di sektor migas," ujar Rofi.

Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan penelitian terhadap biaya riil produksi migas serta melakukan simulasi yang akurat terhadap besaran pendapatan negara, sebelum sistem *Gross Split* ini diberlakukan. ■

(mp), Foto: Nefarungjibr



Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar

Mendesak, Penerapan Teknologi Penyimpanan Gudang Bulog

Banyaknya hama, serangga dan mikro organisme menjadi masalah klasik dalam penyimpanan beras di gudang Bulog. Pasalnya, serangan hama terhadap beras yang disimpan di gudang Bulog bisa merusak kualitas beras, sehingga perlu segera penerapan teknologi penyimpanan di gudang Bulog agar beras bisa tahan lama tanpa mengurangi kualitasnya.

Hal tersebut diungkapkan Viva Yoga Mauladi usai meninjau kondisi Gudang Bulog di Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IV DPR RI baru-baru ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut melihat bahwa selama ini kondisi Gudang Bulog sebagian besar merupakan peninggalan jaman Belanda dan belum tersentuh penerapan teknologi apapun, sehingga daya simpan hanya 3-6 bulan saja.

"Penyimpanan beras di gudang Bulog tanpa teknologi seperti pengaturan suhu ruangan sangat rentan menurunkan kualitas beras yang disimpan, karena faktor cuaca dan serangan hama mikro organisme dalam jangka panjang bisa merusak beras yang disimpan," ungkap Viva Yoga.

Politisi PAN ini menyarankan agar jajaran Bulog segera merevitalisasi semua Gudang Bulog yang dimiliki dengan menerapkan teknologi penyimpanan seperti di negara-negara maju. Ia bahkan mengkhawatirkan jika persoalan teknologi penyimpanan di gudang ini tidak segera dimodernisasi, maka akan berpengaruh terhadap target swasembada beras.

"Negara kita ini besar dan punya potensi panen gabah jutaan ton, apabila tidak didukung teknologi penyimpanan beras yang baik maka semua potensi tersebut bisa menguap begitu saja, mudah rusak karena cara penyimpanan masih manual seperti jaman Belanda," tegas Viva Yoga.

Sementara itu Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Imam Subowo yang ikut mendampingi Kunker Komisi IV DPR RI mengakui ketiadaan teknologi khusus yang diterapkan di Gudang



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog di Kalsel

Bulog Kalsel tersebut. Sehingga stok beras yang disimpan paling lama hanya 3-6 bulan, lebih lama dari itu bisa mengurangi kualitas beras.

"Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kita terapkan dalam penyimpanan beras baru sebatas Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT), ini untuk mengurangi resiko kerusakan beras akibat hama, serangga

dan mikro organisme lainnya," jelas Imam.

Ia juga menjelaskan bahwa rata-rata realisasi penyaluran raskin sampai Desember 2016 mencapai 97%. Bulog Divre Kalsel memiliki rata-rata ketahanan stok per 13 Desember 2016 mencapai 7,08 bulan. Bulog didukung Bank Negara Indonesia (BNI) juga menggagas dibentuknya Rumah Pangan Kita (RPK) untuk memotong mata rantai distribusi pangan.

"Kehadiran RPK ini untuk menjaga harga ditingkat produsen dan juga menjaga harga di tingkat konsumen, sehingga fluktuasi harga pangan bisa diredam dan ditargetkan 2018 terbentuk 1 Desa 1 RPK," terang Imam.

Pihaknya menekankan dengan sistem HET (Harga Eceran Tertinggi) tidak boleh lebih mahal dari harga pasaran, Bulog juga menghidupkan kembali Lumbung Pangan Desa (Bunga Desa) bekerja sama dengan BUMDes dengan membeli gabah dari petani. ■

(giti), Foto: Naufurroji/br

Komisi III DPR RI Dukung Kejati Sulselbar Paling Depan Berantas Korupsi

Komisi III DPR RI mendukung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi institusi hukum paling depan untuk memberantas korupsi. "Kami mendukung apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Sulselbar. Meski demikian langkah-langkah yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tandas Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI, Benny K. Harman menjawab pers usai menggelar pertemuan dengan jajaran Kejati Sulselbar di Makassar, Selasa (20/12).

“Kepada Tim Komisi III, Kejati Sulselbar Hidayatullah mengatakan salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah anggaran. Karena itu Komisi yang membidangi masalah-masalah hukum dan HAM ini akan memperjuangkan saat rapat kerja dengan pemerintah.

"Komisi III akan memperhatikan dan memperjuangkan apa yang diharapkan oleh Kajati Sulselbar dalam raker dengan Keajugung pada masa persidangan mendatang, Januari

Komisi III DPR RI Dorong Pembangunan Lapas di Natuna

Komisi III DPR RI mendorong pembangunan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan *over* kapasitas hingga 200 persen, seperti yang terjadi di Lapas II A Batam. Diketahui, Lapas tersebut hanya memiliki kapasitas tampung 411 orang, namun saat ini ada 1.446 warga binaan disana.

“ Kami mendorong Pemprov Kepri untuk menyiapkan sarana dan prasarana karena menyangkut ketertiban ke depan. Kalau Natuna bisa menampung sekian banyak warga binaan, maka *over* kapasitas yang ada di lapas bisa teratasi dengan baik,” tegas Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III Junimart Ginsang saat pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Kepulauan Riau, Senin (19/12).

Lebih lanjut, politisi dari F-PDI Perjuangan itu meminta Pemprov Kepri menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan agar usulan tersebut dapat disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM dan lembaga terkait lainnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi III Hasrul Azwar mengatakan, kita tidak boleh membiarkan permasalahan *over* kapasitas lapas berlarut. “Kami akan desak Menkumham untuk membangun lapas. Kami



Tim Kunker Komisi III DPR RI meninjau Lapas di Natuna

akan perjuangkan, apalagi ini di Natuna, pintu masuk terjauh Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, politisi dari F-PPP itu juga mengapresiasi program Organisasi Bantuan Hukum (OBH), ia menilai masih banyak masyarakat yang buta hukum sehingga melalui program tersebut, masyarakat bisa mendapatkan edukasi.

Termasuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Mengingat, saat ini hampir diseluruh lapas di Indonesia didominasi oleh tahanan narkoba. “Ini program yang baik, apapun kendalanya

ini harus dipecahkan,” ungkap Hasrul.

Merujuk pada data Kemenkumham Kepri, jumlah persentase tahanan dan narapidana narkoba hingga 48,4 persen dari 3.966 jumlah keseluruhan warga binaan.

Sebelumnya, Kepala divisi imigrasi Kepri Engelbertus Rustarto meminta agar usulan pembangunan lapas di Natuna segera direalisasikan. “Inpresnya sudah ada dari 2010 dan sudah menghabiskan dana 2,2 Milyar untuk lahan. Harapan kami, segera diteruskan karena di tempat Kejaksanaan sangat kurang. Padahal, dalam KUHAP adalah *domain* Kemenkumham bukan Kejaksanaan,” ungkapnya.

Menurutnya, penyediaan lahan sendiri sudah dilakukan oleh Pemkab Natuna yakni seluas 8,9 hektar sehingga sangat disayangkan apabila pembangunan tersebut tidak dilanjutkan. Terlebih lagi, lanjutnya, perangkat hukum di Natuna sudah lengkap, mulai dari Kepolisian, TNI AL, Kejaksanaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan adhoc, Imigrasi dan PSKDP. ■

2017,” ungkap politisi Demokrat ini.

Menjawab soal kecilnya penyelamatan uang negara dari korupsi,

Benny mengutip penjelasan Kajati bahwa jumlah potensi kerugian negara sebesar Rp1 triliun yang berhasil diselamatkan pada tahun 2016 ini sebesar Rp 30,621

miliar. “Penyelamatan hingga saat ini baru Rp30,621 miliar, sementara proses masih terus berjalan,” ia menambahkan.

Sedangkan terkait Bupati Takalar yang ditanyakan sejumlah anggota Komisi III, Kejati Hidayatullah menegaskan, Bupati Takalar non aktif Burhanudin Baharudin belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia menanggapi pertanyaan Ahmad Basarah dari Fraksi PDIP apakah Burhanuddin yang diduga terlibat kasus korupsi penjualan asset negara dan menjadi cabup itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimuat beberapa media.

Padahal lanjut Basarah, Jaksa Agung telah mengeluarkan edaran bahwa calon kepala daerah yang sedang mengikuti proses pilkada maka kasusnya ditunda sampai tahapan

pilkada selesai. “Kami butuh ketegasan saja dari Kajati Sulselbar, ternyata tidak benar jika Bupati Takalar sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Benny K. Harman.

Kajati Hidayatullah menambahkan, tahun 2016 ini tidak ada perkara yang ditangani Kejati Sulselbar yang disupervisi atau diambil alih oleh KPK. Kendala lain dalam menangani kasus korupsi adalah lamanya audit perhitungan kerugian negara oleh BPK maupun BPKP. Selain itu pengadilan Tipikor hanya berada di kota provinsi mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Di sisi lain banyak tersangka, terdakwa atau terpidana yang keberadaannya DPO, sakit atau meninggal dunia. ■



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman

(anne), Foto: Anne/hr

(mp), Foto: Mactur/hr

Komisi X DPR RI Kagumi Kekhasan Motif Batik Banten

Komisi X DPR RI mengagumi ciri khas batik Banten, karena punya motif tersendiri. Motifnya sangat khas bila dibanding dengan tradisi motif batik Nusantara lainnya. Ia mengambil dari gambar-gambar benda bersejarah berupa artefak masa lalu Banten. Batik ini ikut memperkaya khasanah kekayaan batik Nusantara.

Demikian penilaian yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Laila Istiana saat mengunjungi sentra batik Banten di Kota Serang, Sabtu (17/12). "Motif batik Banten berasal dari artefak-artefak lama. Ini telah memperkaya batik Nusantara. Kelak bisa lebih digali lagi potensi batik ini dengan lebih kreatif agar mampu menyerap tenaga kerja. Kerajinan batik di sini bisa terus berkembang."

Batik Banten telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003 untuk melindungi kekayaan hak intelektualnya. Sebelumnya sudah dikukuhkan pula oleh keputusan Gubernur Banten pada tahun yang sama. Ragam hias batik Banten merupakan hasil ekskavasi (penggalian) yang direkonstruksi oleh Arkeologi Nasional dan Fakultas Sastra UI sejak tahun 1976. Ragam hias dari abad ke-17 ini jadi bukti sejarah bagi masyarakat Banten bahwa reruntuhan istana kerajaan Banten dan kejayaan masa lalunya telah



Anggota Komisi X DPR RI, Laila Istiana

mewariskan nilai seni.

Dengan kata lain, sejarah kejayaan masa lalu Banten telah diabadikan di atas kain-kain katun berupa ragam hias batik khas banten. Batik ini tidak saja sebagai busana, lebih dari itu, bisa bercerita tentang jejak sejarah Banten. Inilah yang menarik dari kearifan lokal batik Banten. Sentra batiknya berada di kawasan Cipocok, Kota Serang.

Menurut Laila, keunikan motif batik

Banten terlihat dari ukiran gambar priuk, punden berundak, dan lain-lain. "Mereka mengolahnya menjadi motif batik. Luar biasa sekali. Ini kali pertama saya melihat dan datang ke Banten," ucap Anggota F-PAN tersebut. Ketika ditanya apa yang membedakannya dengan batik Solo, Laila menjawab, batik Solo bermotif imajiner. Sedangkan batik Banten lebih nyata, karena mengambil gambar-gambar artefak.

Delegasi Komisi X DPR RI sempat melihat dari dekat dapur pembuatan batik dan hasil kreasinya berupa kain serta baju. Penamaan motif batik Banten ternyata diambil dari nama desa-desa kuno, nama gelar bangsawan, dan nama tata ruang istana Kerajaan Banten. Misalnya, batik Dataluya merupakan nama tempat tinggal Sultan Maulana Hasanuddin. Batik Kaibonan merupakan pagar yang mengelilingi Keraton Banten. Ada pula batik Surosowan, nama ruang tempat menghadap raja. ■

(mb), Foto: Huter/br

Plt Sekjen DPR RI Terima DPRD Langkat dan Pasuruan

Plt. Sekjen DPR RI, Achmad Djuned didampingi Deputi Persidangan Setjen DPR RI, Damayanti menerima kunjungan Anggota DPRD Langkat dan DPRD Pasuruan. Mereka bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI, serta mendapatkan solusi dan masukan atas berbagai kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD baik di Langkat maupun di Pasuruan.

“ Fungsi-fungsi yang ada di DPRD dengan DPR RI sebenarnya sama, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hanya saja yang tidak ada di DPRD adalah peran diplomasi luar negeri yang diemban oleh Anggota DPR RI,” jelas Achmad Djuned dalam

sambutannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/12).

Djuned menjelaskan, di DPRD tidak ada Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), karena BKSAP tersebut mempunyai tugas untuk



Plt. Sekjen DPR RI, Achmad Djuned menerima kunjungan Anggota DPRD Langkat dan Pasuruan

mengembangkan peran DPR RI untuk masalah-masalah internasional. "DPR RI merupakan anggota

organisasi parlemen dunia, dan cukup aktif peran Indonesia dalam forum-forum yang berskala internasional. Selain itu ada juga organisasi parlemen negara-negara Islam, organisasi parlemen Asia Pasifik, organisasi parlemen Asia maupun ASEAN, yang semuanya diorganisir oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen," paparnya.

Terkait masalah Badan Musyawarah

(Bamus), Djuned mengatakan bahwa posisi Bamus di DPR RI tidak kalah bergengsi dengan Badan Anggaran. Bamus merupakan alat kelengkapan yang paling bergengsi, karena di dalam UU maupun peraturan tata tertib dinyatakan bahwa keanggotaan Bamus jumlahnya adalah sepersepuluh dari jumlah Anggota DPR RI.

"Keanggotaan Bamus adalah

Pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di DPR RI, tidak ada satu alat kelengkapan pun yang keanggotaannya adalah Pimpinan dari Fraksi-Fraksi. Inilah keistimewaan Bamus dari sisi kelembagaan. Jika sudah pada waktunya Bamus tidak dapat melakukan rapat Bamus, maka diganti dengan rapat konsultasi pengganti Bamus," pungkasnya. ■

(dep.rap), Foto: Jayadi/br

Komisi VI DPR RI Minta Fasilitas Crane Di Pelabuhan Malundung Ditambah

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana meminta agar fasilitas *crane* di Pelabuhan Malundung, Kalimantan Utara (Kaltara) dapat ditambah. Pasalnya, dengan fasilitas yang ada, yakni hanya satu *crane*, diakuinya berpotensi menghambat percepatan proses bongkar muat barang.

“ Kami akan mendorong PT Pelindo IV Tarakan untuk menambah fasilitas ini. Kalau dermaganya kami pikir sudah cukup panjang agar bongkar muat lebih cepat. Jika bongkar muat lebih cepat, biaya bersandar kapal akan lebih murah lalu bisa cepat juga sampai ditujuan,” kata Azam, disela-sela peninjauan Tim Kunker Komisi VI ke Pelabuhan Malundung, Kaltara, Selasa (20/12).

Azam mengatakan, saat ini pertumbuhan penggunaan *kontainer* di Tarakan mencapai dua persen, baik itu dari perdagangan kayu lapis maupun udang beku. Ia berharap, agar kegiatan penggunaan *kontainer* di Pelabuhan Malundung juga dapat lebih meningkat.

Di sisi lain, ia berharap agar Pemprov Kaltara juga dapat menyiapkan komoditas sebagai barang kembali, setelah mengangkut hasil pengiriman barang dari berbagai kota besar di Indonesia.

"Sebab, jika dibiarkan kembali dalam kondisi kosong, tentunya biaya akan lebih mahal. Jika ada barang yang diangkut, tentunya ongkos angkut yang berangkat tidak dibebankan kepada bahan bakar yang dibawa ke daerah asal," imbuh Azam.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu

m e n a m b a h k a n , transportasi angkutan barang yang ada di Kaltara hampir sama dengan angkutan yang ada di Indonesia bagian timur. Untuk mengantisipasi keseimbangan komoditas, Pemerintah RI akan membangun tol laut untuk melakukan keseimbangan komoditas barang angkutan.

"Subsidi seperti ini akan kami berlakukan secara nasional. Makanya tol laut akan kami rencanakan untuk menekan biaya transportasi walaupun butuh proses kedepannya," jelas politisi asal Dapil Jawa Timur itu.

Melihat aktivitas pengangkutan *kontainer* ke dalam kapal dan melihat perkembangan pembangunan Pelindo IV, Azam mengungkapkan hal ini juga menjadi tugas Komisi VI sekaligus sebagai pelaksana penyertaan modal negara (PMN). Untuk Pelabuhan Malundung sendiri mendapatkan dana PMN sekitar Rp150 miliar dengan pembuatan penumpukan *kontainer* atau reklamasi tempat *kontainer*.



Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau Pelabuhan Malundung di Kaltara

Sementara itu, General Manager Pelindo IV Tarakan, Suhadi Hamid menjelaskan proses pengembangan pelabuhan berupa reklamasi seluas 2,4 hektar, dimaksudkan sebagai lahan penumpukan *kontainer* dari kapasitas 40.000 TEUs per tahun menjadi 300.000 TEUs.

"Kemungkinan reklamasi ini akan selesai di akhir 2017. Untuk anggaran sendiri memang sudah disiapkan sebesar Rp123 miliar dari Rp 2 triliun yang disiapkan dari dana PMN, yang dialokasikan untuk sembilan pelabuhan dibawah pengawasan PT Pelindo IV, diantaranya di Sorong, Bitung, Tarakan dan Makassar," kata Suhadi. ■

(tw), Foto: Iwan/br

Perekonomian Nasional 2016 Memburuk

Banyak harapan mengemuka menyambut tahun 2017 di tengah kondisi dan fakta perekonomian nasional yang belum kondusif sepanjang 2016. Catatan kritis perekonomian nasional diungkap, agar pada 2017 diharapkan membaik.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan catatan kritisnya atas fakta dan data perekonomian nasional sepanjang tahun 2016 dalam rilisnya yang diterima Senin (02/01). Pertumbuhan domestik masih diwarnai tren perlambatan dan kualitas pertumbuhan yang belum membaik. Walau sudah di atas 5 persen, tapi target pertumbuhan dalam APBN 2016 yang dipatok 5,2 persen tidak tercapai.

Sementara kualitas pertumbuhan yang ada juga belum menyerap tenaga kerja secara maksimal. Data Bappenas 2016, estimasi



Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan

pertumbuhan 1 persen hanya mampu menyerap 110 ribu tenaga kerja. Menurut Heri, angka ini justru menurun dibanding 5 tahun sebelumnya yang mencapai 225 ribu serapan tenaga kerja. Ada beberapa masalah yang masih membelit sektor ketenagakerjaan.

Diungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut, saat ini persentase pekerja masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah (60,24 persen). Sementara pekerja berpendidikan menengah 27,24 persen dan yang berpendidikan tinggi 12,24 persen. Dari data ini, 50 persen penduduk masih bekerja di sektor informal. "Ironisnya, sektor tersebut juga mulai dimasuki oleh tenaga kerja asing asal Cina yang ilegal."

Heri menambahkan, tingkat penyerapan

tenaga kerja industri menurun dari 15,97 juta pada Februari, menjadi 15,54 juta pada Agustus. Apalagi, ada data yang memperlihatkan 23,26 juta penduduk menjadi setengah pengangguran dan 8,97 juta masih bekerja separuh waktu. "Pengangguran harus diatasi lebih serius. Dari indikator yang ada, kesejahteraan belum menunjukkan pencapaian yang memuaskan," kata Heri lagi.

Tidak hanya itu, tahun 2016 tingkat kedalaman kemiskinan memburuk menjadi 1,94. Anggota F-Gerindra DPR RI ini berharap pertumbuhan yang ada harus merata. Indeks gini yang turun ke angka 0,93 ternyata juga tidak menggambarkan pemerataan yang nyata, karena hanya diukur dari seberapa besar pengeluaran, bukan pendapatan. "Hingga saat ini dari pertumbuhan yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen orang. Sementara 80 persen yang lain sangat rentan untuk tertinggal," ucap Heri.

Di sektor perdagangan, neracanya belum berkualitas. Surplus yang ada hanya disebabkan penurunan nilai impor yang lebih drastis dibanding pertumbuhan kinerja ekspor. Sepanjang 2016, ekspor terus menurun. Nilai total ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2016 mencapai USD 117,09 miliar, menurun 8,04 persen dibanding periode yang sama 2015. "Kinerja perdagangan yang belum membaik tersebut mengancam cadangan devisa dan stabilitas rupiah yang relatif rentan terhadap penurunan."

Pada bagian lain, Heri juga memberi catatan kritis atas ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan ini dipicu oleh investasi. Realisasi investasi Januari-September 2016 masih terpusat di Jawa yang mencapai Rp203,2 triliun. Butuh keseriusan untuk meningkatkan investasi di luar Jawa. "Penyederhanaan izin dan

fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor harus menjadi fokus pemerintah, baik di pusat maupun daerah," harap Heri.

Sementara itu, inflasi masih meningkat. Pada Januari-Oktober 2016 berada pada level 2,11 persen tahun ke tahun. Penyebabnya, lanjut Heri, daya beli masyarakat stagnan dan harga-harga kebutuhan pokok melambung naik. Tak ada jalan lain, pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat lewat program riil yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat.

Terakhir, kata Heri, pengelolaan fiskal harus kredibel. Cara menumpuk utang seperti dilakukan pemerintah saat ini yang sebagian besar didominasi SBN untuk menutup defisit, memperlihatkan pengelolaan fiskal yang tidak kredibel. Ini bisa menjerumuskan pada guncangan keuangan yang serius. ■

(mb), Foto: azka/br

Lapas Kelebihan Kapasitas Cenderung Munculkan Kejahatan Baru

Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik mengharapkan Kemenkumham melakukan langkah-langkah efektif untuk mengidentifikasi lapas mana saja yang *over capacity* (kelebihan kapasitas). Misalkan kelebihan sudah sampai 300 persen maka perlu segera dilakukan perbaikan kondisi lapas, dengan membangun gedung baru sekaligus menambah ruangan dan juga menambah jumlah sipir.

Komisi IV DPR RI Apresiasi Serapan Perum Bulog Lampung

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan Perum Bulog Divre Lampung untuk meningkatkan produksi dan kualitas beras di Lampung, sebagaimana dalam paparan Perum Bulog Divre Lampung bahwa hingga Desember 2016, pengadaan beras di Lampung mencapai 137 ribu ton dari target 120 ribu ton. Angka itu merupakan pencapaian terbesar dalam sejarah Bulog Lampung. Selama ini, rekor penyerapan tertinggi tercapai pada 2009, sebesar 122 ribu ton beras.

“ Mungkin dulu, serapan rendah, kualitas kurang baik tetapi sekarang serapannya baik dan kualitas menuju yang lebih baik. Ini adalah upaya yang tentunya harus kita berikan apresiasi, kita (Komisi IV) akan terus memberikan dukungan, kritiknya dan koreksi dalam upaya perbaikan-perbaikan tersebut,” ungkap Herman Khaeron.

Lompatan besar itu tidak lepas dari tekad Pemprov Lampung untuk meningkatkan produksi gabah dan memperkecil pengiriman gabah ke luar daerah. Hasilnya, pengadaan beras di Lampung menempati posisi pertama dari tujuh produsen utama beras nasional dan sudah mampu memasok beras ke lima daerah yakni Bengkulu,



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, per September 2016.

Herman juga mengingatkan bahwa Bulog didirikan memiliki dua misi yakni sebagai *Buffer stock* nasional dan untuk stabilisator harga ditingkat pasar. Sehingga Bulog tidak hanya

menjaga stok beras nasional namun mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPR RI Dapil Lampung I Sudin, Lampung sesungguhnya sudah sejak orde baru merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional namun akibat minimnya pengawasan banyak irigasi yang rusak sehingga menurunkan produksi beras Lampung.

"Jika saat ini, produksi beras Lampung sudah melebihi target itu hal yang wajar karena saat ini sudah ada perbaikan-perbaikan irigasi yang membuat produksi beras Lampung meningkat dan tentu ini akan mengembalikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional," ungkapnya. ■

(skr), Foto: Siringgibbr



Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik

“ Lepas dengan kondisi *over capacity* cenderung akan menimbulkan tingkat kejahatan baru. Dalam ruang sempit dengan banyak orang, maka mudah menyulut emosi. Dari saling pukul, penganiayaan bahkan bisa terjadi pembunuhan,” tekan Erma Suryani kepada pers di sela-sela kunjungan kerja

ke Sulsel belum lama ini di Makassar.

Lebih jauh politisi Demokrat ini menyatakan, persoalan *over capacity* (kelebihan kapasitas) lepas tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) tetapi hampir di seluruh Indonesia. Salah satu sebabnya adalah banyaknya kasus-kasus narkoba.

"Boleh dicek bahwa penghuni lepas-lapas sebageian besar adalah kasus narkoba. Termasuk di Sulsel, 50 persen penghuni lepas karena kasus narkoba," kata legislator dari Dapil Kalbar ini.

Dalam memproses korban kejahatan narkoba, menurut Erma kadang divonis hukuman penjara dan menjadi penghuni lepas, padahal mestinya ada yang tidak harus menghuni lepas melainkan bisa direhabilitasi. Kasus-kasus seperti itu akhirnya menambah jumlah napi di lepas.

Dikemukakan pula bahwa napi narkoba termasuk napi korupsi adalah bagian dari PP 99 yang tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat sehingga mereka akan selamanya di lepas sesuai dengan vonis hukumannya. Berbeda dengan kasus kejahatan lain seperti pencurian, pembunuhan dan lainnya yang terbuka untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Terkait dengan penjelasan Kanwil Kemenkumham Sulsel, Erma Suryani mengatakan dari pemaparan yang disampaikan, sudah ada perbaikan maksimal. "Saya mengapresiasi langkah-langkah Kemenkumham terkait lepas di Sulsel ini. Mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti pembangunan lepas-lapas lainnya," ia mengharapkan. ■

(mp), Foto: Maatur/b

Komisi X DPR RI Temukan Kekurangan Tenaga Dosen Vokasi di Bali

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali mendapatkan informasi bahwa Politeknik Negeri Bali mengalami kekurangan dosen yang ahli dalam vokasi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra yang memimpin kunker mengatakan, hal itu harus menjadi perhatian Pemerintah.

Demikian dikatakannya usai pertemuan tim Komisi X dengan Pembantu Rektor II Universitas Udayana (UNUD) Bali, Direktur Politeknik Negeri Bali dan Kopertis Wilayah VIII di Kampus UNUD, Bali, Sabtu (17/12).

"Salah satu yang kita dapat hari ini yaitu dari Direktur Politeknik Negeri Bali yang menyampaikan bahwa sampai saat ini kekurangan dosen yang ahli dalam vokasi. Ini perlu perhatian dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, agar dosen-dosen di Politeknik itu adalah dosen-dosen yang mengerti vokasi," kata Sutan.

Politisi yang akrab disapa SAH itu menambahkan, dosen-dosen yang ada selama ini, adalah dosen-dosen dari akademi, sehingga kualifikasi vokasinya masih sangat

kurang.

"Bagaimana lulusan politeknik ini siap pakai, kalau dosennya sendiri belum memahami tentang vokasi itu," kata politisi F-Gerindra itu seolah bertanya.

Selain masalah dosen, Komisi X DPR RI juga mendapatkan informasi bahwa selama ini dalam penanganan Politeknik

khususnya vokasi ini masih ditangani oleh pejabat setingkat Kepala Bidang di Kemenristekdikti.

Menurutnya hal tersebut kurang komprehensif. Ia berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Menristekdikti saat Rapat Kerja di Komisi X nanti.

"Hasil dari pertemuan ini akan kita bicarakan dengan menteri, kami akan minta untuk masalah vokasi ini setingkat Direktur atau Direktorat," tandasnya.

Berbagai temuan ini, tambah Sutan, merupakan input yang sangat berharga bagi Komisi X DPR RI. Sehingga dengan demikian, kedepannya diharapkan pendidikan vokasi ini menjadi skala prioritas.

"Jika ini sudah menjadi skala prioritas, maka penanganan pendidikan vokasi harus setingkat direktur untuk memudahkan koordinasi," tegas politisi dari daerah pemilihan Jambi itu. ■



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra

(se), Foto: Suci/br

Persatuan Indonesia Tak Boleh Terpecah Karena Isu Sara

Anggota Komisi VI DPR RI, Idris Laena mengingatkan pentingnya menjaga persatuan Indonesia di tengah maraknya isu sara yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, seyogyanya hal itu perlu diwaspadai, karena kalau melihat sejarah bangsa yang pernah mengalami konflik pada akhirnya tidak pernah ada yang bisa *survive*. Hal itu diungkapkan dalam rilis yang diterima Parlemen pada Senin, (02/01).

“Dulu kita kenal istilah *divide at empera*. Dan benar saja bahwa yang terjadi seolah-olah ada agenda terselubung untuk memecah belah kekuatan bangsa dengan menggunakan isu sara,” ujar Idris yang saat itu berada di London dan berbincang dengan masyarakat sekitar.

Ia pun juga menyoroti pandangan masyarakat London yang melihat kondisi

perekonomian Indonesia yang dianggap sudah terlalu liberal dan kebebasan berpendapat yang sudah terlalu longgar. "Bahkan menurut mereka, di Eropa sendiri masih ada rambu yang membatasi orang berpendapat. Sehingga persoalan hukum dan kebijakan politik, tidak bisa diintervensi oleh siapapun atas nama publik. Apalagi sekedar opini yang mengatas namakan rakyat," ujarnya.

Dalam bayangan masyarakat London, jika Pemerintah Indonesia terus melakukan pembiaran maka tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memuluskan agenda terselubung yang indikasinya bisa dirasakan dengan politik adu domba.

Ia pun mencontohkan kondisi negara di Timur Tengah yang cukup banyak



Anggota Komisi VI DPR RI, Idris Laena

diintervensi oleh negara luar sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam

menjadi bangsa yang gagal seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, Yaman, dan

berbagai aspek. "Menurut saya, pandangan tersebut memang perlu diwaspadai. Karena kalau melihat sejarah bangsa-bangsa yang pernah mengalami konflik pada akhirnya tidak pernah ada yang bisa *survive* kembali," jelas Idris.

"Jika kemudian ditunggangi oleh negara besar yang berkepentingan maka sudah pasti

sekarang yang menjadi perhatian adalah perang antar saudara yang ditunggangi oleh negara lain yaitu di Syria," sambungnya.

Politisi Golkar ini menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki sumber daya alam melimpah serta kondisi geografis yang strategis menjadi sasaran dari intervensi negara luar. Oleh karenanya persatuan antar kompeten masyarakat sangat diperlukan guna menghadapi tantangan global tersebut.

"Dan untuk negara seperti Indonesia, rasanya akan menjadi sasaran dari intervensi negara luar. Mengingat peta geographis, demografi dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Bukankah pada pasca reformasi kita telah kehilangan Timor Leste," tutup Idris Laena. ■

(Is), Foto: Jaka/br

Komisi VI DPR RI Dorong Pemerintah Bangun Penggilingan Padi di Bengkulu

Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan bantuan alat pertanian paska panen khususnya penggilingan pagi, sehingga dapat menambah nilai jual hasil pertanian masyarakat.

“Komisi VI mendorong Pemerintah, dalam hal ini Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian memberikan solusi kebijakan dan bantuan berupa alat penggilingan beras kepada masyarakat Bengkulu, sehingga perekonomian setempat lebih meningkat,” kata Gde Sumarjaya Linggih, usai pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan SKPD Provinsi Bengkulu. Senin (19/12).

Menurut politisi partai Golkar ini, tingginya harga pengadaan penggilingan padi menjadi penyebab petani tidak mampu untuk memiliki penggilingan padi tersebut. Hal ini dimanfaatkan para tengkulak dan pengusaha untuk membeli harga gabah petani dengan harga murah.

"Ini akan kami sampaikan kepada pemerintah saat Rapat Kerja di DPR RI,



Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih

untuk dicarikan solusinya bagi petani dan masyarakat Bengkulu," kata Gde Sumarjaya Linggih.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa hasil pertanian berupa jumlah gabah sangatlah besar, namun masyarakat masih membeli beras dari luar Bengkulu.

"Bengkulu surplus gabah tapi kita membeli beras dari luar. Berarti ada ketidaknormalan, karena pada musim panen, gabah dibeli langsung di sawah petani oleh cukong dari luar lalu mereka olah kemudian masuk kembali ke Bengkulu sudah bentuk kemasan," katanya.

Rohidin mengharapkan adanya terkait tanaman pangan terkait kebijakan provinsi dengan keluarnya jumlah gabah yang sangat besar sehingga masuk kembali ke Bengkulu dalam bentuk beras kemasan ternyata mempengaruhi juga harga beras di Bengkulu.

"Pengembangan pangan harus mendapatkan perhatian agar gabah yang telah dihasilkan dapat diolah di Bengkulu dan juga dapat dipasarkan di sini. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian Bengkulu," katanya. ■

(as), Foto: Agung/br

Hasil Pansel Komisioner KPU-Bawaslu Berpotensi Ditolak Komisi II DPR RI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan hasil pansel anggota KPU dan Bawaslu berpotensi ditolak oleh Komisi II DPR RI. Mengingat, dari hasil seleksi tahap II masih terdapat persoalan dari calon yang telah lulus seleksi. Hal itu diungkap dalam rilis yang diterima Parlemen pada Selasa, (03/01).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah masih adanya keanggotaan pansel yang bermasalah seperti merangkap sebagai komisaris BUMN, PNS dan sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini dianggap bertentangan dengan semangat UU.

"Dari awal beberapa fraksi mengingatkan adanya persoalan hukum di keanggotaan pansel,

yaitu beberapa anggota pansel dianggap bermasalah, yaitu ada yang merangkap sebagai penyelenggara pemilu saat ini, kemudian ada yang menjabat komisaris di BUMN, dan ada yang masih pejabat (PNS). Ini dianggap bertentangan dengan semangat UU. Kalau panselnya sarat kepentingan, hasilnya pasti juga punya konflik kepentingan," ujar Lukman.

Selain itu, Politisi PKB ini menyoroti adanya temuan komunikasi intensif antar anggota pansel dengan calon. Hal ini adalah melanggar etika sebagaimana yang terjadi saat rekrutmen anggota Ombudsman RI pada tahun 2016 yang mengakibatkan hasil pansel dikembalikan ke Setneg.

"Adanya temuan komunikasi intensif anggota pansel dengan calon, termasuk tim yang ditunjuk oleh pansel untuk melakukan penilaian secara administratif ternyata melakukan komunikasi lebih intensif dengan calon-calon. Temuan ini menjadi persoalan dan mengulang praktik yang melanggar etika seperti rekrutmen



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy

ORI setahun yang lalu, yang mengakibatkan seluruh calon dikembalikan Komisi II ke Setneg. Ini mengulangi kesalahan yang sama," ujar Lukman.

Selain itu, Lukman juga menyoroti adanya norma yang berbeda antara UU yang lama dengan RUU yang baru, misalnya dari sisi syarat usia, pendidikan, dan jumlah keanggotaan, serta syarat-syarat yang harus disesuaikan dengan perkembangan kewenangan tambahan dari KPU RI dan Bawaslu RI.

"Adanya norma yang berbeda antara UU yang lama dengan RUU yang baru, terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu, misalnya dari sisi syarat usia, pendidikan, dan jumlah keanggotaan, serta syarat-syarat yang harus disesuaikan dengan perkembangan kewenangan tambahan dari KPU RI dan Bawaslu RI. Ini akan menimbulkan persoalan di belakang. Kita akan mendapatkan anggota KPU dan Bawaslu yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemilu 2019," jelasnya.

Terhadap persoalan ini, Lukman menjelaskan ada yang mengusulkan agar

rekrutmen ditunda sampai lahirnya UU baru agar semangatnya bisa sesuai. "Terhadap soal ini ada yang mengusulkan, sebaiknya rekrutmen ditunda sampai lahirnya UU baru, sehingga bisa sesuai dengan semangatnya. Jika untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pemilu yang sudah habis jabatannya, sebenarnya bisa di perpanjang terlebih

dahulu," jelas Lukman.

Sebagaimana diketahui, hasil seleksi tahap II Pansel Pemerintah terhadap anggota KPU RI dan Bawaslu RI telah menghasilkan 36 calon KPU RI dan 22 calon Bawaslu RI. Lukman pun berharap seleksi tahap selanjutnya Pansel dapat mempertahankan objektifitasnya, sehingga komisioner yang terpilih bukan saja pendidikannya cukup tetapi juga punya kemampuan teknis dan manajerial yang kuat.

Satu catatan yang agak mengecewakan pada rekrutmen calon anggota KPU RI ini, lanjut Lukman adalah tidak ada yang berlatar belakang teknik informatika atau ahli di bidang IT. "Padahal kita sedang mendorong KPU ke depan kuat basis teknologinya, terutama untuk menyongsong pemilu berbasis elektronik, *data base* yang bisa dipertanggungjawabkan, serta sistem penghitungan yang juga berbasis elektronik. Mudah-mudahan seleksi tahap berikutnya pansel tetap mempertahankan objektifitasnya," pungkasnya. ■



Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf diwawancarai awak media sebelum rapat paripurna

IPU Harus Segera Bersikap Bantu Etnis Rohingya

Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mendesak Inter Parliamentary Union (IPU)- Organisasi Parlemen Dunia segera mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi perdamaian atas konflik di Myanmar. Kekerasan yang dialami masyarakat etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya diatasi.

“ *Inter-Parliamentary Union* (IPU) yang menaungi 171 parlemen dunia, dinilai Nurhayati sangat lamban membantu penyelesaian konflik Rohingya. Nurhayati yang juga *President of the IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* (Komite IHL), sudah mendesak secara tertulis kepada IPU untuk mengambil langkah strategis tersebut. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang menimpa etnis Rohingya.

Dalam pernyataannya yang diterima Parlemen, Selasa (03/01). Nurhayati juga mengingatkan Sekjen IPU, ada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status sosial.

"Ketika suatu negara tidak mampu melindungi warga negara, maka secara nyata terdapat potensi pelanggaran terhadap hukum *humaniter Internasional* dan hak asasi manusia," tegas

politisi Partai Demokrat itu. Atas desakan surat Nurhayati itu, Sekjen IPU pun akhirnya mengeluarkan sikapnya atas konflik Rohingya.

Sekjen IPU Martin Chungong akhirnya menyurati Parlemen Myanmar bahwa IPU siap bekerja sama memberi solusi atas konflik yang sedang terjadi. Sekjen IPU sendiri siap memfasilitasi dialog para pihak yang berkonflik. Diharapkan dialog ini mampu mengambil kebijakan menuju jalan rekonsiliasi dan perdamaian di Myanmar.

IPU merupakan organisasi parlemen internasional yang dibentuk pada tahun 1889 dan beranggotakan parlemen dari 171 negara. Organisasi parlemen global ini dibentuk untuk mengembangkan kontak, koordinasi, dan pertukaran pengalaman antara parlemen dan anggota parlemen. Selain itu, IPU juga merupakan sarana dialog isu-isu internasional dan tindakan nyata parlemen bagi penuntasan isu-isu tersebut. ■

(anm/npj). Foto: Kresna/br



LENSA PARLEMEN



Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR RI Achmad Djuned memberikan sambutan dalam acara rapat tahunan Persatuan Pegawai Pensiunan Setjen (P3S) DPR-RI, Rabu (4/1), Foto: Jaka/hr

Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Fary Djemy Francis meninjau Pelabuhan dan Bandara di Bali, (14/12). Foto: Husen/hr



Tim Kunker Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Azman Natawijana meninjau Terminal BBM PT.Pertamina dan Pasar Tradisional Tenguyun di Kaltara, Selasa (20/12). Foto: Iwan/hr